

**INOVASI PROGRAM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) MELALUI APLIKASI JAGA.ID DALAM MENEGAH KORUPSI DILEVEL PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:
LIANA JANTRI
07011282025076**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

INOVASI PROGRAM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) MELALUI APLIKASI JAGA.ID DALAM MENCEGAH KORUPSI DILEVEL PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**

Oleh:

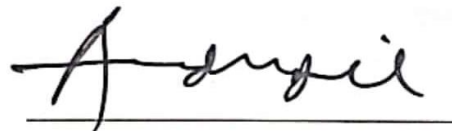
**LIANA JANTRI
NIM. 07011282025076**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 09 Maret 2024


Pembimbing

Tanda Tangan

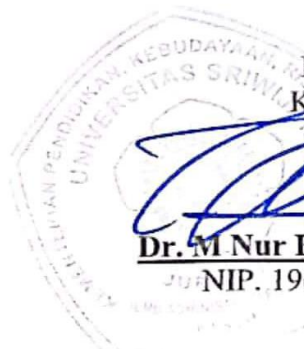
Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196024121990011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
INOVASI PROGRAM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) MELALUI APLIKASI JAGA.ID DALAM MENCEGAH KORUPSI DILEVEL PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

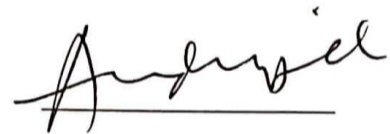
SKRIPSI
Oleh:
Liana Jantri
NIM. 07011282025076

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 25 Maret 2024

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196024121990011001

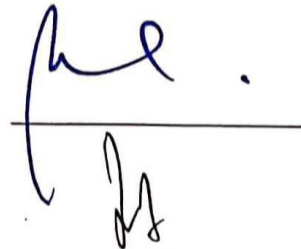
Tanda Tangan



Penguji

1. **Junaidi, S.IP., M.Si**
NIP. 197603092008021009

Tanda Tangan



2. **Lisa Mandasari, S.IP., M.Si**
NIP. 198603272023212029



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfatri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liana Jantri

NIM : 07011282025076

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bersungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Inovasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi JAGA.ID dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” ini benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,
Indralava. 09 Maret 2024



Liana Jantri
NIM. 07011182025006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Berdoalah sampai kamu melihat apa yang kamu doakan”

Atas ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Superheroku Papa Supardi yang selalu berjuang untuk kehidupan saya, beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi ini.
2. Pintu surgaku Mama Yarsi yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan doa dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi ini.
3. Ayuk Merlin Aprieni, SE., Kakak Agus, Adek Jenny, Abang Taqiim, Adek Syaqirah dan Keponakanku Adek Agyn yang selalu mendukung, memberi semangat dan memotivasi selama ini.
4. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri Liana Jantri yang telah kuat sampai saat ini dan tidak menyerah sesulit apapun yang dihadapi.
5. Keluarga Besar Gede Harun dan Gede Ibrahim, terkhusus sepupu saya Dolor (Puja Agm) yang telah mendukung dan memberikan semangat selama ini.
6. Seluruh teman dan sahabat yang pernah ada dalam cerita hidup saya.
7. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. yang telah memberikan Ilmunya.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
9. Teman seperjuangan Administrasi Publik 2020
10. Almamater Tercinta

ABSTRAK

INOVASI PROGRAM *MONITORING CENTER FOR PREVENTION* (MCP) MELALUI APLIKASI JAGA.ID DALAM MENCEGAH KORUPSI DILEVEL PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

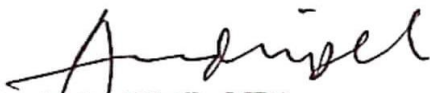
By:

Liana Jantri 07011282025076

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan korupsi yang terjadi dilevel pemerintahan daerah. Diterapkannya program MCP melalui Aplikasi Jaga.Id diharapkan dapat mencegah korupsi dilevel pemerintahan daerah khususnya provinsi Sumatera Selatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan inovasi program *monitoring center for prevention* (MCP) melalui aplikasi Jaga.Id dalam mencegah korupsi dilevel pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan teori inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers yang memiliki 5 dimensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Manfaat penelitian ini agar dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam lingkup bidang studi pemerintahan, keuangan dan administrasi publik. Hasil penelitian dari penerapan program MCP melalui Jaga.Id sudah diterapkan dengan cukup baik. Transparansi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat maupun pemerintahan juga sudah baik. Pada program ini melibatkan pihak eksternal bagian keuangan dalam mencegah korupsi pemerintahan daerah. Namun masih kurangnya pegawai yang menyebabkan beban kerja yang berlebihan karena harus mengurus semua tugas sendirian yang memerlukan perbaikan dalam kegiatan monitoring.

Kata Kunci: Inovasi, *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Jaga.Id, Pemda

Pembimbing:



Dr. Andy Alfatih, MPA.

NIP. 196024121990011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACK

INOVASI PROGRAM MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) MELALUI APLIKASI JAGA.ID DALAM MENCEGAH KORUPSI DILEVEL PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

By:

Liana Jantri 07011282025076

This investigation is undermined by the corruption issue that has taken place beyond the local government. The implementation of the MCP program through the Application Jaga.It is expected to prevent corruption out of the local government in particular the province of South Sumatra. The research aims to find out how the implementation of the innovation of the monitoring center for prevention (MCP) program through the application Jaga.Id in preventing corruption is removed from the local government. This research uses the theory of innovation proposed by Everett M. Rogers that has five dimensions. The research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques of in-depth interviews, documentation and observations. Benefits of this research in order to add knowledge and insights in the scope of studies of government, finance and public administration. The research results of the implementation of the MCP program through Jaga.Id have been applied quite well. The transparency and information provided to the public and the government is also good. The program involves the external financial part in preventing the corruption of the local government. However, there is still a shortage of staff who are causing excessive workloads because they have to take care of all the tasks on their own that require improvements in monitoring activities.

Keywords: Innovation, Monitoring Center for Prevention (MCP), Jaga.Id, Defender

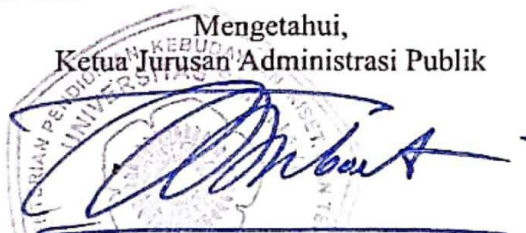
Pembimbing:



Dr. Andy Alfatih, MPA.

NIP. 196024121990011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmad, karunia dan izin-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang judul ”Inovasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan Daerah (Studi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan dan terimakasih, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga dimudahkan selama proses penyusunan Skripsi.
2. Kedua orang tua Papa Supardi dan Mama Yarsi yang selalu mendoakan, mendidik, memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan terkait proses penyusunan Skripsi.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang sudah membantu melancarkan proses Penyusunan Skripsi.
8. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu selama penelitian ini.
9. Saudara Kandung Merlin Aprieni, S.E., Agus Wahyudi, Jenny Pertiwi, Mustaqiim, Syaqirah Melijeta dan keponakan Adreena Zalfanaara Aglyn, serta seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepada diri sendiri Liana Jantri yang telah kuat dan tidak pernah menyerah sampai saat ini, sesulit apapun rintangan yang harus dihadapi dengan air mata, yang mampu tegar dalam menghadapi masalah yang ada. Semoga tetap selalu rendah hati.
11. Seluruh keluarga besar Gede Harun dan Gede Ibrahim, terkhusus Dolor (Puja Agm) yang telah mendukung, memberi semangat dan motivasi selama proses ini.

12. Teman-teman Kost Pak Arsyad (Dolor, Yuyun, Astrid, Yuni, dan Yuk Fifin) yang telah memberikan tempat tinggal dan semangat selama penelitian.
13. Teman seperjuangan (Arna, Wulan, Melati, Nike, Bella, Wendi dan Riski) yang telah kebersamai dan berjuang proses penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian skripsi.

Tanpa dukungan pihak-pihak tersebut peneliti tidak mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semua usaha yang telah peneliti berikan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, namun tentunya tidak terlepas dari kesalahan, maka adari itu peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di waktu mendatang. Atas kerjasama dan perhatiannya, peneliti ucapkan terimakasih.

Indralaya, 25 Maret 2024



Liana Jantri
NIM. 07011282025076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Inovasi	12
2.2.1 Pengertian Inovasi.....	12
2.2.2 Level Inovasi	14
2.2.3 Tipologi Inovasi	15
2.2.4 Strategi Inovasi.....	16
2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi.....	16
2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	17
2.4 Program <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP).....	18

2.5	Aplikasi Jaga.Id	20
2.6	Mencegah Korupsi	21
2.7	Pemerintahan Daerah	22
2.8	Teori Inovasi Pelayanan Publik.....	23
2.5.1	Teori Inovasi Menurut Bloch.....	23
2.5.2	Teori Inovasi Menurut Everett M. Rogers	24
2.5.3	Teori Inovasi Menurut Pedoman Umum.....	25
2.5.4	Teori Inovasi Menurut Doley.....	26
2.9	Teori Inovasi yang Digunakan	27
2.10	Kerangka Teori.....	28
2.11	Kerangka Pemikiran	30
2.12	Hipotesis Deskriptif.....	32
2.13	Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Desaian Penelitian	37
3.2	Definisi Konsep.....	37
3.3	Fokus Penelitian	39
3.4	Unit Analisis dan Unit Observasi.....	41
3.5	Informan Penelitian	41
3.5.1	Kriteria Informan	41
3.5.2	Key Informan	41
3.6	Data dan Sumber Data.....	42
3.6.1	Data	42
3.6.2	Sumber Data.....	42
3.7	Teknik Pengumpulan Data	42
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	42
3.9	Teknik Analisis Data	43
3.10	Sistematika Penulisan.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	47
4.1.1	Profil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	47
4.1.2	Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	49

4.1.3	Struktur Organisasi	50
4.1.4	Gambaran Umum SubBagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP)	56
4.2	Informan Penelitian	57
4.3	Hasil Penelitian.....	58
4.3.1	Keunggulan Relatif	58
4.3.2	Kesesuaian.....	60
4.3.3	Kerumitan.....	63
4.3.4	Kemungkinan Dicoba.....	66
4.3.5	Kemudahan yang Diamati.....	68
4.4	Pembahasan	69
4.4.1	Keuntungan Relatif	70
4.4.2	Kesesuaian.....	73
4.4.1	Kerumitan.....	76
4.4.2	Kemungkinan Dicoba.....	78
4.4.3	Kemudahan Diamati.....	80
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Highlight</i> Survey Penilaian Integritas 2022	1
Tabel 1.2 Capaian Monitoring Center for Prevention Sumatera Selatan.....	6
Tabel 1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Tabel Komposisi Personil Berdasarkan Alokasi Dan Jenjang Pendidikannya.....	55
Tabel 4.1 Manfaat.....	58
Tabel 4.2 Transparansi.....	60
Tabel 4.3 Relevan.....	61
Tabel 4.4 Regulasi.....	62
Tabel 4.5 SDM.....	64
Tabel 4.6 Sistem Terbuka.....	65
Tabel 4.7 Menguji Kualitas.....	67
Tabel 4.8 Dapat Dibandingkan.....	68
Tabel 4.9 Informasi yang Diakses.....	69
Tabel 4.10 Progres Keberhasilan Wilayah Sumatera Selatan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Stuktur Organisasi.....	54
Gambar 4.2 SK bersama pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 dan Pedoman Penilaian MCP 2023.....	75
Gambar 4.3 Faktor Eksternal yang Terlibat.....	77
Gambar 4.4 Capaian MCP Pemda Sumatera Selatan.....	79
Gambar 4.4 Fitur Aplikasi Jaga.Id.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian dari Kantor.....	93
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
Lampiran 6 Validasi Plagiat Skripsi.....	96
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara.....	97
Lampiran 8 Form Perbaikan Ujian Skripsi.....	98

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

MCP	: <i>Monitoring Center for Prevention</i>
JAGA.ID	: Jaringan Pencegah Korupsi Indonesia
KPK RI	: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
SPI	: Survey Penilaian Integritas
BMD	: Barang Milik Daerah
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
STRANAS PK	: Strategi Nasional Pencegah Korupsi
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APH	: Aparat Penegak Hukum
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
APIP	: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Perpres	: Peraturan Presiden
SK	: Surat Keputusan
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah dalam negeri yang memiliki dampak besar bagi perekonomian negara. Dari data penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2004 sampai 2022, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) merupakan pelaku korupsi terbanyak berdasarkan instansi, yaitu sebanyak 695 orang atau 54%. Jika dilihat dari penyebabnya, terdapat tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan (*Triangle Fraud Theory*), yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi (Cressey, 1953).

Merujuk pada data Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, skor SPI Pemerintah Daerah di Indonesia sebesar 69,2. Beberapa *highlight* yang dapat diperhatikan dalam memetakan titik rawan korupsi daerah antara lain:

Tabel 1.1 *Highlight* Survey Penilaian Integritas 2022

<i>Highlight</i>	Titik Rawan Korupsi
Tingkat Keyakinan dan Kejadian Risiko Suap, Gratifikasi, dan Pungli serta <i>Trading In Influence</i>	Eksternal: 24%; Internal: 25%; Eksper: 19% Penilaian adanya perdagangan pengaruh: Penentuan program/ kegiatan, Penentuan pemenang tender, Pemberian izin/ pemberian rekomendasi teknis, Rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai, Negosiasi denda/ sanksi, Penetapan penerima program bantuan pemerintah

<i>Highlight</i>	Titik Rawan Korupsi
Permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Internal: ± 33%, Pemenang vendor sudah diatur: 28%, Kualitas barang dan jasa rendah: 36%, Nepotisme: 37%, Gratifikasi: 29%, Hasil PBJ tidak bermanfaat: 33%.
Penyalahgunaan Fasilitas Kantor Untuk Kepentingan Pribadi	Internal: 59%; Pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan Pribadi (termasuk teman, keluarga, dll)
Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan SDM	Internal: 11% Pemberian uang, barang, dan fasilitas dalam mutasi dan promosi. 11% responden internal mengakui masih terdapat jual beli jabatan di instansinya. Hubungan Kekerabatan: 27%; Kedekatan dengan Pejabat: 33% Kesamaan Almamater: 23%
Penyalahgunaan Anggaran Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5% Responden internal melihat/ mendengar penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas terjadi. 2. 9% responden internal melihat/ mendengar penyalahgunaan SPJ untuk honor, biaya transport lokal, dll. 3. 19% kalangan eksper menyatakan bahwa terdapat risiko penyalahgunaan anggaran di K/L/PD.

Sumber: Booklet Hasil SPI 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa dengan melakukan identifikasi titik rawan korupsi, pemerintah dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah. Sehingga memudahkan dalam proses upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu dan melapor jika masalah korupsi terjadi. Dalam hal ini, masyarakat terlibat dalam memberikan pengawasan yang lebih baik dalam upaya mencegah tindakan korupsi. Pada era yang terjadi saat ini, tanpa disadari telah membawa masyarakat menuju era masyarakat digital. Teknologi digital memiliki peran penting dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan komitmen yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di dunia ini. Teknologi digital berkontribusi pada semua target SDGs terutama pilar SDG 9, yaitu infrastruktur, industri dan inovasi yang dapat meringankan serta mengatasi permasalahan yang sedang diatasi dan meningkatkan kemampuan teknologi di semua Negara.

Inovasi merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi adalah suatu alat, hal, atau gagasan yang baru dimana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, dimana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Era digitalisasi yang terjadi saat ini, tanpa disadari telah membawa

masyarakat menuju era masyarakat digital. Kemajuan Teknologi yang terus berkembang perlahan mengubah kehidupan sosial masyarakat serta cara manusia berelasi dengan manusia lain.

Kemajuan teknologi informasi merupakan bagian dari globalisasi yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat *modern* seperti sekarang. Hal ini memberikan tuntutan besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi baik antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Sehingga memberikan kemudahan terhadap masyarakat mengakses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan baik (*good governance*).

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Untuk mendorong pemerintahan daerah yang baik dan bebas dari KKN, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108). Pemerintah telah melakukan inovasi dengan membuat aplikasi pelaporan atas upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah dilakukan melalui *Monitoring Center for Prevention* atau yang lebih dikenal dengan MCP yang dapat diakses melalui laman JAGA.ID. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi baik sebelum terjadi korupsi maupun setelah upaya penindakan korupsi telah dilakukan baik oleh KPK maupun APH lain.

Monitoring center for prevention (MCP) merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi. Program *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) merupakan program monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervise pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK RI pada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi 7 area rawan korupsi dan intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Program MCP merupakan jembatan KPK dan Inspektorat Daerah dalam memainkan peran pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.

Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Berdasarkan hasil identifikasi titik rawan korupsi pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi serta memperhatikan data penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, maka fokus area pencegahan

korupsi daerah tahun 2023 adalah Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen BMD dan Tata Kelola Desa.

Dalam menjalankan program MCP, pelaporan atas upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui aplikasi Jaga.Id. Jaga.Id adalah sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respons, dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (Jaga.Id). Jaga.Id memiliki wadah khusus untuk pendidikan antikorupsi. Wadah tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi. Tidak hanya itu, publik juga dapat mengakses regulasi daerah lainnya di *platform* Jaga.Id. Berikut capaian nilai MCP provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.2 Capaian *Monitoring Center for Prevention* Provinsi Sumatera Selatan

NO	AREA	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Perencanaan dan Penganggaran	85,50%	79,1%	93,73%
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	79,45%	74,9%	91,39%
3.	Perizinan	92,13%	82,2%	100%
4.	Pengawasan APIP	76,90%	89,8%	64,87%
5.	Manajemen ASN	79,92%	79,7%	71,16%
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	60,83%	76,0%	93,11%
7.	Pengelolaan BMD	81,65%	62,6%	86,54%
	NILAI MCP	79,83%	78,15%	86,08%

Sumber: Pointer Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) tahun 2021 sebesar 78,15%. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 79,83%. Namun, pada tahun 2022 Capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) kembali meningkat sebesar 86,08%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Walaupun pada capaian MCP meningkat, akan tetapi masih ada 2 area yang mengalami penurunan yaitu pada Pengawasan APIP dan Manajemen ASN.

Merujuk dari data capaian MCP diatas, Adanya layanan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi JAGA.ID ini dianggap belum efektif dan menjadi solusi alternatif bagi upaya pelaporan pencegahan korupsi pemerintahan daerah. Alasannya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya peran kepala perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan tanggungjawab dalam pencapaian 7 area investigasi.
2. Menurunnya capaian MCP pada Area pengawasan APIP dan Manajemen ASN.
3. Adanya komitmen pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintahan Kabupaten/ kota untuk mencegah segala hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Dari ketiga alasan tersebut akan diuraikan seperti dibawah ini:

1. Masih kurangnya peran kepala perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan tanggungjawab dalam pencapaian 7 area investigasi.

Masih kurangnya peran kepala perangkat daerah dalam pencapaian 7 areainvestigasi untuk segera melakukan akselerasi kinerja guna untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

2. Menurunnya capaian MCP pada Area pengawasan APIP dan Manajemen ASN.

Kurangnya pengawasan pada Area pengawasan APIP dan Manajemen ASN.

Walaupun terdapat peningkatan pada capaian MCP tahun 2022, tetapi pada area pengawasan APIP dan Manajemen ASN mengalami penurunan yang signifikan, seperti yang diketahui bahwa inspektorat termasuk sebagai aparatur pengawasan akan tetapi pada area pengawasan terdapat penurunan.

3. Adanya komitmen pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintahan Kabupaten/ Kota

Komitmen ini menunjukkan niat untuk menjaga integritas dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menyalahi peraturan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat serta meminimalisir risiko tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika dan hukum.

Atas komitmen tersebut maka pemerintahan provinsi Sumatera Selatan memintah tim KPK agar terus dapat mendampingi dan membimbing dalam upaya-upaya pencegahan pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui program MCP. Pendampingan diupayakan untuk meningkatkan kualitas tata kelolah pemerintahan provinsi/ kabupaten/ kota se-Sumatera Selatan untuk lebih baik, transparan dan akuntabel. Aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan optimal jika dilakukan secara bersama-sama dan berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan program pencegahan korupsi.

Tabel 1.3 Alasan Pemilihan Judul

No.	Bentuk Kesadaran	Keterangan
1.	Masih kurangnya peran kepala perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan tanggungjawab dalam pencapaian 7 area investigasi.	Masih kurangnya peran kepala perangkat daerah dalam pencapaian 7 area investigasi untuk segera melakukan akselerasi kinerja guna untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2.	Kurangnya pengawasan pada Area pengawasan APIP dan Manajemen ASN	Walaupun terdapat peningkatan pada capaian MCP tahun 2022, pada area pengawasan APIP dan Manajemen ASN mengalami penurunan yang signifikan, seperti yang diketahui bahwa inspektorat termasuk sebagai aparatur pengawasan akan tetapi pada area pengawasan terdapat penurunan.
3.	Adanya komitmen pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintahan Kabupaten/kota untuk mencegah segala hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.	Di wilayah Sumatera selatan, Indeks MCP yang didapatkan memiliki skor 74 dari 76 rerata nasional. Dengan adanya komitmen implementasi aksi ditambah pemantauan dan evaluasi, SPI dan indeks perilaku anti korupsi di wilayah Sumatera Selatan diharapkan dapat lebih meningkat melebihi nilai rerata nasional.

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023)

Berdasarkan pada alasan yang telah diuraikan diatas, penulis ingin melihat apakah penerapan inovasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id ini dapat meningkatkan upaya pencegahan korupsi pemerintahan daerah dan apakah inovasi tersebut berhasil atau gagal. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan “Inovasi Program *Monitoring*

Center for Prevention (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang terdapat di latar belakang maka rumusan masalah yang didapat yaitu:

1. Bagaimana Inovasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Inovasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Inovasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Inovasi Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi Jaga.Id dalam Mencegah Korupsi Dilevel Pemerintahan Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan studi serta acuan mengenai Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui laman Jaga.Id ditahun-tahun berikutnya dan dapat juga dijadikan evaluasi terhadap *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi JAGA.ID.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pembahasan dan wawasan dalam lingkup administrasi publik khususnya bidang administrasi publik mengenai Program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui laman Jaga.Id Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi serta masukan berupa hasil-hasil pemikiran bagi pihak akademik dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Baiti, N. J., & Soemitra, A. (2022). Evaluasi Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2), 129–136.
- Anggraeni, N., & Purnamasari, H. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi SAPA CETAR. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2009–2014.
- Astuti, D. A. L., Winoto, J., & Suprehatin, S. (2023). The Effect of Corruption Prevention Efforts with Regional Corruption Cases and Complaints. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(10), 3259–3272.
- Date, R., Date, R., Date, A., Behavior, A., & Korupsi, P. A. (2022). Pembentukan perilaku anti korupsi terhadap pejabat di Aceh melalui Religius. *Jurnal Tahqiq* 16(1), 72–81.
- Dyah Kuntorini Dwi Angreni, Kuntorini, D., Rizki, A., & Satria, O. (2022). Building Capacity dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 459–471. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.108>
- Elkesaki, R. 'Arsy, Oktaviani, R. D., & Setyاهرlambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 69–90. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456>
- Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2022). Capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Pemerintahan Sumatera Selatan.
- Kinerja, J. W. (2016). Jurnal Wacana Kinerja. *Wacana Kinerja*, 21(November), 1–318.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). *Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

- Mariana, D., Paskarina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007) Perbandingan Pemerintahan. Buku Materi Pokok Universitas Terbuka, Jakarta.
- Padli, P., Ibrahim, M. A., Nara, N., & Sukri, P. (2022). Institutional design on corruption prevention collaboration in South Sulawesi Province. *International Journal of Health Sciences*, 6(March), 2948–2956. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.5091>
- Pemerintahan Indonesia (2023), Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Indonesia.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Rafinzar, R & Kismartini (2020), Inovasi *E-Government* Dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program E-Mussrenbang Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 (No. 2), 227-250.
- Saputro, H. N. (2023). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik. In *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* (Vol. 26, Issue 1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>
- Sumarauw, D. C., Manossoh, H., Wokas, H. R. N., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2023). Analisis Peran Apip Terhadap Program Monitoring Centre for Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Mcp Korsupgah) Kpk Dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, 14(1), 0.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf b Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dan memindaklanjuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/ Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023.

Wibowo, R. A (2015), Mencegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Apa yang Sudah dan yang Harus Dilakukan?). Jurnal Integritas, Vol.1 No.1, 37-60.